

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, tabulasi silang, dan regresi logistik terhadap data *Susenas* tahun 2025 di Provinsi Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, demografi, dan kesehatan rumah tangga. Lingkungan sosial terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap status perceraian, di mana individu yang tinggal di wilayah dengan tingkat perceraian tinggi memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami perceraian. Hal ini menguatkan konsep *social contagion* dan norma sosial, di mana keterpaparan terhadap perilaku perceraian di lingkungan sekitar dapat menurunkan ambang norma dan meningkatkan penerimaan sosial terhadap perceraian itu sendiri.

Pernikahan dini menunjukkan hasil yang berbeda dari sebagian besar literatur Barat. Dalam konteks Indonesia, individu yang menikah pada usia di bawah 19 tahun justru memiliki kemungkinan lebih rendah untuk bercerai. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh faktor sosial-budaya yang masih kuat, seperti nilai religiusitas, kontrol sosial komunitas, serta struktur keluarga yang cenderung kolektif, sehingga pasangan muda mendapat dukungan sosial yang lebih besar untuk mempertahankan pernikahan mereka.

Faktor ekonomi, yang diukur melalui kepemilikan BPJS PBI dan luas lantai rumah, menunjukkan kecenderungan meningkatkan risiko perceraian dalam tabulasi silang, meskipun tidak seluruhnya signifikan dalam regresi logistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemiskinan tetap berperan sebagai faktor tekanan dalam rumah tangga (*economic stress model*), tetapi keterbatasan indikator ekonomi dalam data *Susenas* dapat membatasi ketepatan estimasi hubungan tersebut.

Selanjutnya, kondisi disabilitas seperti gangguan fisik, emosional, atau kesulitan mengurus diri memperlihatkan peningkatan proporsi perceraian, meskipun arah pengaruhnya bervariasi antar jenis disabilitas. Hasil ini

menunjukkan kompleksitas hubungan antara keterbatasan fungsional dan stabilitas keluarga, di mana beban perawatan dan tekanan psikologis dapat menjadi sumber ketegangan rumah tangga.

Dari sisi struktur rumah tangga, ditemukan pola yang berlawanan. Jumlah anggota rumah tangga yang lebih banyak justru menurunkan kemungkinan perceraian, kemungkinan karena adanya dukungan sosial dan ekonomi antaranggota keluarga yang memperkuat ikatan rumah tangga. Sebaliknya, jumlah keluarga lebih dari satu dalam satu rumah secara signifikan meningkatkan risiko perceraian. Kondisi hunian padat semacam ini berpotensi memicu konflik antar keluarga, mengurangi privasi, dan meningkatkan tekanan emosional.

Faktor demografi juga terbukti berperan penting dalam menjelaskan variasi perceraian. Usia yang lebih tua, jenis kelamin perempuan, serta jam kerja yang panjang secara konsisten meningkatkan risiko perceraian. Perempuan cenderung lebih rentan terhadap perceraian, baik karena peran ganda yang mereka jalankan maupun karena mereka lebih sering menjadi pihak penggugat ketika terjadi ketimpangan relasi domestik, sebagaimana ditegaskan oleh teori feminis dan penelitian Smock dan Manning (2004). Sementara itu, jam kerja panjang berpotensi menurunkan kualitas interaksi antar pasangan dan meningkatkan konflik rumah tangga, sejalan dengan teori *work-family conflict* (Greenhaus & Beutell, 1985).

Akhirnya, pendidikan terbukti memiliki efek protektif terhadap stabilitas pernikahan. Individu dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki kemampuan komunikasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik, serta lebih mampu mengelola tekanan sosial dan ekonomi dalam rumah tangga. Temuan ini sejalan dengan teori modal manusia Becker (1981), yang menyatakan bahwa pendidikan meningkatkan kualitas hubungan dan memperkecil risiko perceraian melalui peningkatan rasionalitas dan kemampuan adaptasi pasangan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa perceraian bukan hanya hasil dari dinamika emosional pasangan, tetapi juga cerminan dari struktur sosial dan ekonomi yang melingkupi kehidupan rumah tangga. Pendekatan kebijakan yang komprehensif dan berbasis bukti diperlukan untuk memperkuat ketahanan keluarga, terutama melalui penguatan pendidikan, perlindungan

ekonomi, kesetaraan gender, serta dukungan sosial bagi kelompok rentan seperti keluarga berpenghasilan rendah dan penyandang disabilitas.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan implikasi di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, bagi pemerintah daerah, perlu adanya integrasi program pembangunan sosial yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas keluarga, melalui pendidikan pranikah, pendampingan keluarga, dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Kedua, bagi pembuat kebijakan nasional, penting untuk mengembangkan sistem data dan indikator ketahanan keluarga yang lebih komprehensif, agar kebijakan berbasis data dapat diterapkan secara efektif.

Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi longitudinal atau menggunakan pendekatan kualitatif guna memahami dinamika sosial-psikologis yang tidak tertangkap dalam data survei rumah tangga seperti *Susenas*. Kajian mendalam mengenai norma sosial, pola komunikasi pasangan, dan peran komunitas religius juga akan memperkaya pemahaman mengenai faktor-faktor non-ekonomi yang memengaruhi perceraian.

Keempat, bagi masyarakat dan lembaga sosial, penting untuk memperkuat jejaring dukungan sosial di tingkat komunitas. Keterlibatan lembaga keagamaan, organisasi perempuan, dan kader masyarakat dapat berperan signifikan dalam membangun budaya komunikasi dan resolusi konflik yang sehat di dalam keluarga.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan kebijakan dan program ketahanan keluarga dapat berjalan efektif untuk menekan angka perceraian dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga di Jawa Barat maupun Indonesia secara umum.